



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NAJAMUDDIN
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 625712

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 5.675.800.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/80 m2 di SUMBAWA BARAT, HIBAH TANPA AKTA Rp. 250.000.000
2. Tanah Seluas 95000 m2 di SUMBAWA BARAT, HIBAH TANPA AKTA Rp. 450.000.000
3. Tanah Seluas 36000 m2 di SUMBAWA BARAT, HIBAH TANPA AKTA Rp. 100.800.000
4. Tanah Seluas 10000 m2 di SUMBAWA BARAT, HIBAH TANPA AKTA Rp. 75.000.000
5. Tanah Seluas 500 m2 di KOTA MATARAM , WARISAN Rp. 500.000.000
6. Tanah Seluas 30000 m2 di LOMBOK TIMUR, WARISAN Rp. 3.000.000.000
7. Tanah Seluas 400 m2 di LOMBOK BARAT, WARISAN Rp. 450.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/200 m2 di KOTA MATARAM , WARISAN Rp. 500.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m2/120 m2 di LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 10.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO MATIC Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 22.930.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	7.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	5.715.730.000
III. HUTANG	Rp.	498.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.217.730.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

